

PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENDAMPINGAN KPM (STUDI DESA PUCANGSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN)

Khumaidi, Sri Devi
Universitas Yudharta Pasuruan

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2024
Revised September 2024
Accepted September 2024
Available online September 2024

Email :

diandradevi28@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program andalan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Payung hukum yang menjadi landasan yuridis program PKH adalah Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang memiliki tujuan pengentasan kemiskinan.

Melihat tujuan program PKH sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tentu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pendamping program PKH dan KPM. Disinilah peran pendamping sosial yang diharapkan dapat mengawal program PKH agar betul-betul tepat sasaran serta dalam pencairan dana apakah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan atau gaya hidup. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini Pengembangan kapasitas pendamping program keluarga harapan desa pucangsari menggunakan 3 tingkatan pengembangan kapasitas pendamping PKH yaitu tingkatan pengembangan kapasitas individu pendamping program keluarga harapan desa, pengembangan kapasitas organisasi dan yang terakhir adalah pengembangan kapasitas Lingkungan atau Sistem Sosial. Faktor penghambat pengembangan kapasitas pendamping program keluarga harapan (PKH) antara lain adalah jadwal pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga antara pendamping dengan KPM, Persepsi negatif dari sebagian masyarakat Desa Pucangsari pengembangan kapasitas pendamping program keluarga harapan didesa pucangsari .

Kata kunci : Pengembangan Kapasitas, Pendamping PKH, Desa Pucangsari

Abstract

Sri Devi. Public Administration Study Program, Yudharta University, 2024. Capacity Development for Family Hope Program (PKH) Companion Capacity (Study Pucangsari Village, Purwodadi District, Pasuruan Regency). Supervisor: Dr. Khumaidi, S. PdI., M. Si. P

The Family Hope Program (PKH) is the government's flagship program in prospering the community through the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The legal umbrella that is the juridical basis of the PKH program is the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program which has the goal of poverty alleviation.

Seeing the objectives of the PKH program as regulated in the law, it will certainly not run optimally without good cooperation and coordination between PKH program assistants and KPM. This is where the role of social companions is expected to oversee the PKH program so that it is really on target and in the disbursement of funds whether it is used according to needs or lifestyles. This study uses a qualitative method with a descriptive approach.

The results of this study The development of the capacity of the pucangsari village family hope program uses 3 levels of PKH companion capacity development, namely the level of individual capacity development for the village family hope program, organizational capacity



development and the last is the development of environmental or social system capacity. Factors inhibiting the development of the capacity of the family hope program (PKH) include the schedule at the Family Capacity Building Meeting between the companion and the KPM, the negative perception of some people in Pucangsari Village, the development of the capacity of the family hope program companion in Pucangsari Village.

Keywords: Capacity Development, PKH Assistant, Pucangsari Village

Sri Devi. Public Administration Study Program, Yudharta University, 2024. Capacity Development for Family Hope Program (PKH) Companion Capacity (Study Pucangsari Village, Purwodadi District, Pasuruan Regency). Supervisor: Dr. Khumaidi, S. PdI., M. Si. P

The Family Hope Program (PKH) is the government's flagship program in prospering the community through the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The legal umbrella that is the juridical basis of the PKH program is the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program which has the goal of poverty alleviation.

Seeing the objectives of the PKH program as regulated in the law, it will certainly not run optimally without good cooperation and coordination between PKH program assistants and KPM. This is where the role of social companions is expected to oversee the PKH program so that it is really on target and in the disbursement of funds whether it is used according to needs or lifestyles. This study uses a qualitative method with a descriptive approach.

The results of this study The development of the capacity of the pucangsari village family hope program uses 3 levels of PKH companion capacity development, namely the level of individual capacity development for the village family hope program, organizational capacity development and the last is the development of environmental or social system capacity. Factors inhibiting the development of the capacity of the family hope program (PKH) include the schedule at the Family Capacity Building Meeting between the companion and the KPM, the negative perception of some people in Pucangsari Village, the development of the capacity of the family hope program companion in Pucangsari Village.

Keywords: Capacity Development, PKH Assistant, Pucangsari Village

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem negara kesejahteraan yang mewajibkan untuk negara juga turut hadir dalam menyelenggarakan upaya-upaya yang mendukung proses warga negara untuk diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967). Maka dari itu pada tahun 2023 kementerian sosial Republik Indonesia (RI) melalui unit kerja yang menangani PKH sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan telah menyalurkan bantuan sosial PKH menggunakan dua mitra lembaga salur yaitu Bank Penyalur dan Pos Penyalur (Kemensos RI, 2024).

Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program andalan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, Payung hukum yang menjadi landasan yuridis program PKH adalah Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang memiliki tujuan pengentasan kemiskinan



membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan 1 berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka (Permensos, Pasal 3).

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional (Diaz & Susiloadi, 2023)

Melihat tujuan program PKH sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tentu tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pendamping program PKH dan KPM. Disinilah peran pendamping sosial yang diharapkan dapat mengawal program PKH agar betul-betul tepat sasaran serta dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu saja pendamping program PKH harus benar-benar bisa memastikan dana yang sudah cair dipergunakan untuk kebutuhan KPM bukan untuk memenuhi gaya hidup. Tidak hanya itu Keterbatasan Sumber Daya Pendamping juga mengakibatkan seringkali harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, baik dari segi waktu, anggaran, maupun fasilitas. Hal ini menyulitkan mereka dalam memberikan pelatihan atau pendampingan yang optimal kepada penerima manfaat. Pendamping program PKH juga diatur dalam BAB III pasal 10 tentang SDM poin H. Secara umum tugas para pendamping sebagaimana bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan.

Menurut Milen (2004: 12), kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus. Morgan (dalam Haryanto, 2014: 14) mengartikan kapasitas sebagai kemampuan, ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Kapasitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Dari berbagai penjelasan tentang pengembangan kapasitas pengembangan kapasitas dapat disimpulkan sebagai proses peningkatan kemampuan individu atau organisasi atau komunitas untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, output, outcome yang telah ditentukan (Sari, Novita; Noor, 2015).

Sehingga peneliti mengambil fokus mengenai tingkatan pengembangan kapasitas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melalui study desa Pucangsari. guna keberhasilan PKH di Kabupaten Pasuruan awal tahun 2020 ini, program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pasuruan ketambahan 128 pendamping PKH baru. Sehingga jumlah pendamping PKH saat ini berjumlah 321 orang. Berdasarkan penemuan di Desa Pucangsari hambatan pelaksanaan dalam kebijakan program keluarga harapan berkenaan dengan pendamping PKH yaitu banyak ketidakpahaman KPM terhadap program PKH sehingga menyebabkan adanya KPM yang menyalahgunakan bantuan PKH untuk memenuhi gaya hidup bukan untuk kebutuhan yang diperlukan. (Yusuf Hidayat, Laila Azkia, 2022)

Pengelolaan sumber daya atau dalam hal SDM dalam pelaksanaan program PKH salah satunya yaitu pendamping sosial yang 2 memiliki peran sangat vital bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan masing-masing. Kualitas SDM Pendamping Sosial PKH merupakan faktor yang memiliki peranan penting dalam menentukan kesuksesan saat pelaksanaan program PKH sehingga wajib dilakukan berbagai cara dan upaya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Tindakan yang tepat dan bijaksana



harus dapat diambil untuk membekali dan mempersiapkan dan membekali para pendamping sosial PKH, sehingga mereka mampu menjadi aset pembangunan dan pembawa perubahan bagi bangsa yang produktif dan bermanfaat. Oleh karena itu, agar pendamping sosial PKH dalam melakukan tugasnya sebagai pendamping sosial lebih profesional dan bisa di andalkan, sangat perlu untuk diselenggarakan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) untuk meningkatkan kompetensi pendamping sosial PKH. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan SDM pendamping sosial PKH, agar mereka memiliki peningkatan dalam pengembangan kapasitas, keterampilan, skill dan sikap dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM) yang di dampingi. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 bagian Bab II pasal 2, tercantum bahwa tujuan Diklat yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas dan jabatan secara fungsional 3 dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan ,pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Penjelasan didalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa tujuan yang terpenting dalam melaksanakan pengembangan Kapasitas Pendamping PKH yaitu adanya dampak yang positif terhadap para pendamping PKH, setelah mereka mengikuti pengembangan kapasitas diharapkan agar mereka mampu meningkatkan sikap dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dan tanah air, meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang ada dalam dirinya serta mampu membangun kerjasama yang solid dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya masing masing.

Berdasarkan penjelasan diatas merupakan suatu hal menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh dengan judul pengembangan kapasitas Pendamping PKH di desa pucangsari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif sering disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik, bisa juga disebut sebagai metode etnografi karena penelitian dilakukan dengan setingan alamiah (Sugiono, 2010). Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alam yang berkembang secara alami, tanpa manipulasi oleh peneliti, dan pengalaman peneliti tidak mengubah dinamika objek secara signifikan (Anggito& Setiawan, 2018).

Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terjadi dilapangan. Menurut Sugiono (2010), dijelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek alam, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulannya dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pengembangan kapasitas pendamping program keluarga harapan desa Pucangsari dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berusaha menggambarkan secara tepat dan akurat fenomena yang terjadi secara nyata,



akurat, dan sistematis berdasarkan fakta yang ada melalui pengumpulan, penjelasan, dan pendataan yang objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti menulis landasan teori di bab II dan data-data di lapangan ternyata sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Program program serupa yang sebelumnya dilakukan pun cukup berhasil di beberapa Negara, kalau diluar negara Indonesia sering dikenal dengan sebutan Conditional Cash Transfer (CCT) atau yang lebih dikenal dengan sebutan dengan bantuan tunai bersyarat dan ini sudah sering dikemukakan di penelitian penelitian sebelumnya. Program Keluarga Harapan memiliki tujuan serta maksud sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan dari pengalaman negara-negara yang lainnya, program-program yang sama memiliki banyak manfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Namun, tujuan dari PKH sendiri adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang mana merupakan harapan jangka panjang yang ingin di capai.

Menurut dias & Susilo adi menyatakan bahwa PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan nasional yang diman PKH mempunyai manfaat dan juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat dan konstitusi negara.

Sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) didesa pucangsari merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin yang kemudian diubah menjadi KPM yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan. Program Keluarga Harapan tahapan persiapan ini. Kedua tahapan pengkajian dengan memvalidasi data oleh pemerintah desa. Ketiga tahap perencanaan alternative program dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan pendamping PKH agar penyaluran sesuai dengan sasaran. Keempat tahapan implementasi program yaitu dengan ditetapkannya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Seperti halnya pada penelitian terkait pengembangan kapasitas pendamping PKH desa Pucangsari. Dimana terjadi fenomena dari Program Keluarga Harapan itu sendiri yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Program ini sangat berkaitan dengan berbagai pihak serta pengawasan didalamnya. Kebebasan seseorang dari kemiskinan, kebodohan dan ketakutan adalah arti dari kesejahteraan, karena hal itu memungkinkan KPM untuk memiliki kehidupan yang tenang dan aman baik secara fisik maupun emosional.

Persyaratan fisik, mental, spiritual dan sosial keluarga harus dipenuhi agar anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat dan utuh yang akan dihargai sebagai anggota masyarakat ketika mereka cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Dengan adanya Program Keluarga Harapan dan banyaknya manfaat yang dirasakan oleh KPM memberikan harapan pada mereka semoga program ini memiliki keberlanjutan yang lama dan diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Pemberdayaan sendiri bukan hanya meliputi penguatan secara individu anggota masyarakat, namun juga pranata-pranatanya. Ada banyak cara untuk memberdayakan komunitas, tetapi semuanya dimulai dengan menciptakan kondisi yang tepat bagi potensi komunitas untuk tumbuh.

Seperti halnya terkait dengan penelitian pengembangan kapasitas melalui Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi. ini memiliki fenomena dimana pengembangan kapasitas pendamping PKH yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat Desa



Pucangsari Kecamatan Purwodadi khususnya KPM PKH. pengembangan kapasitas pendamping PKH ini dilakukan guna memberdayakan KPM agar bisa menjadi mandiri baik dari segi ekonomi maupun sosialnya. tujuan dari pengembangan kapasitas memiliki 2 indikator yaitu kecakapan dan kesanggupan.

1. Kesanggupan

- a. Kemampuan Beradaptasi dan Mengatasi Tantangan di Lapangan: Pendamping harus sanggup menghadapi berbagai tantangan di lapangan, termasuk beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya yang beragam, serta mampu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama proses pendampingan.
- b. Ketersediaan dan Konsistensi dalam Pelaksanaan Tugas: Kesanggupan juga mencakup komitmen waktu dan tenaga yang memadai untuk menjalankan tugas secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk kesanggupan dalam mendukung penerima manfaat secara berkelanjutan.

2. Kecakapan (Competency):

- a. Penguasaan Materi dan Metodologi PKH : Pendamping harus memiliki pemahaman mendalam tentang konsep, tujuan, dan prosedur operasional PKH, termasuk pengetahuan tentang regulasi, syarat, serta hak dan kewajiban penerima manfaat. Penguasaan metodologi pendampingan dan teknik komunikasi yang efektif juga menjadi bagian penting dari kecakapan ini.
- b. Kemampuan Penggunaan Teknologi Informasi : Pendamping PKH perlu menguasai alat dan aplikasi teknologi yang digunakan dalam program, seperti aplikasi pemantauan dan pelaporan, untuk memastikan data yang akurat dan pelayanan yang optimal.

mencakup enam hal, antara lain :

- a. Perbaikan kelembagaan atau Tentunya dengan adanya pemberdayaan KPM PKH yang ada di Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi akan memberikan dampak kepada luasnya jaringan kemitraan yang ada ditengah-tengah masyarakat khususnya KPM PKH itu sendiri. Dengan dibuktikan bagaimana awalnya KPM PKH ini giat menghadiri pertemuan bulanan atau P2K2 dirumah ketua kelompok KPM.
- b. Perbaikan usaha dengan adanya program pemberdayaan dari KPM PKH Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi sendiri diharapkan memberikan dampak positif bagi KPM PKH seperti perbaikan pada usaha baik dibidang pendidikan anak-anak mereka atau bahkan dari segi usaha mereka. Dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi karena bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh bantuan PKH tersebut.Serta tabungan dari sisa dana pendidikan dapat membantu KPM untuk meningkatkan nilai dari usaha yang tengah mereka jalankan. Seperti di desa pucangsari sendiri sudah mulai banyak perkembangan anak yang bisa bahkan bisa melanjutkan kejenjang perkuliahan. Melihat dari dulu bagaimana rendahnya Pendidikan masyarakat desa pucangsari. Perbaikan pendapatan ini sendiri merupakan ikatan tak terputus. Apabila dari adanya perbaikan usaha ini baik tentu bukan hal yang mustahil untuk memperbaiki pendapatan mereka juga. Dengan adanya bantuan PKH tentunya sangat membantu Perbaikan masyarakat.

PKH yang ada Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi. tentunya memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi Dengan adanya PKH dan pemberdayaan lain yang lahir dari KPM PKH mampu membawa perubahan positif bagi perekonomian serta sosialisasi mereka. Meluasnya rukun tetangga yang baik dampak dari adanya pertemuan bulanan PKH atau P2K2 cukup menjadi sarana masyarakat dalam bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Namun tidak hanya itu dalam analisis peneliti menemukan juga beberapa permasalahan karena adanya pertemuan bulanan PKH atau



P2K2 ada masyarakat desa pucangsari beranggapan bahwa pertemuan kelompok hanya sebagai ajang gossip.

Pengembangan kapasitas adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi, komunitas, atau masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan mereka secara efektif dan berkelanjutan. Ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, struktur, sistem, dan sumber daya sehingga pihak-pihak tersebut dapat berfungsi lebih efisien, beradaptasi dengan perubahan, dan mencapai kinerja yang optimal.

Pengembangan kapasitas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menurut Robert Milen melibatkan berbagai model-model yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pendamping dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif dan efisien.

Tingkatan Pengembangan Kapasitas Pendamping PKH Menurut Milen:

1. Pengembangan Kapasitas Individu adalah proses peningkatan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi seseorang agar lebih efektif dalam peran atau tanggung jawab mereka. Tujuannya adalah untuk memperkuat potensi individu sehingga mereka dapat berkontribusi lebih baik pada organisasi, komunitas, atau tujuan pribadi mereka.:
 - a. Pelatihan dan Pendidikan: Meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan tentang program, dan kemampuan dalam mengelola kasus.
 - b. Peningkatan Keterampilan Sosial: Melatih keterampilan komunikasi, mediasi, dan pendekatan partisipatif untuk berinteraksi dengan penerima manfaat.

Pengembangan kapasitas individu penting untuk memastikan bahwa seseorang dapat terus tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerja atau kehidupan mereka. Ini juga merupakan fondasi bagi pengembangan kapasitas yang lebih luas di tingkat organisasi atau komunitas.

Pengembangan kapasitas individu pendamping PKH yang dilakukan dari Program Keluarga Harapan kepada KPM Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi adalah dengan adanya Pertemuan Pengembangan Kemampuan Keluarga atau P2K2, yang bertujuan sebagai berkumpulnya para KPM untuk berbagi ilmu pengetahuan seperti penyampaian modul-modul dan juga sosialisasi agar Pendamping desa Pucangsari mempunyai pengalaman dan wawasan baru. Contohnya kegiatan sosialisasi "pegang ATM sendiri" hal ini bertujuan memberi pengetahuan kepada KPM yang sudah lanjut usia agar mereka mempunyai rasa percaya diri dan bisa mengambil dana yang sudah diberikan kepada KPM tanpa titip dan mengantisipasi kebobolan ATM bahkan penyalahgunaan ATM.

Pengembangan Kapasitas pendamping PKH melalui pertemuan dengan keluarga penerima manfaat PKH melalui P2K2. Pengertian dari P2K2 sendiri adalah proses belajar secara terstruktur guna memperkuat terjadi perubahan perilaku pada KPM. Secara umum P2K2 memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga. Selama proses pertemuan bulanan PKH atau P2K2 di desa Jungpasir KPM diberikan materi-materi oleh pendamping berupa materi yang membangun seperti bagaimana menjaga kesehatan, mengenai pencegahan stunting, pengelolaan uang. Cara penyampain materi dari pendamping yang cukup menarik memberikan kesan antusias dari KPM sehingga mampu dengan mudah menyerap informasi yang di sampaikan oleh pendamping PKH.

Dengan adanya pertemuan ini bukan hanya untuk mereview tujuan, kewajiban dari keluarga penerima manfaat PKH. Pendamping juga akan memantau KPM dengan dilaksanakannya pertemuan ini dengan cara diber ikan buku monitoring penggunaan anggaran bagi KPM.

2. Pengembangan Kapasitas Organisasi adalah proses peningkatan kemampuan, efisiensi, dan keberlanjutan suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Ini melibatkan penguatan



struktur, sistem, proses, sumber daya manusia, dan budaya organisasi sehingga organisasi dapat berfungsi lebih efektif dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

a. Peningkatan Sistem dan Proses: Mengoptimalkan sistem manajemen data, pelaporan, dan pemantauan untuk mendukung tugas pendamping.

b. Manajemen Sumber Daya: Meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia dan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan PKH.

c. Pengembangan kapasitas organisasi adalah upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi misinya secara efektif, merespons tantangan eksternal, dan terus berkembang sesuai dengan perubahan kebutuhan dan peluang.

3. Pengembangan Kapasitas Lingkungan atau Sistem Sosial proses memperkuat kerangka kerja eksternal yang memengaruhi kemampuan individu, organisasi, atau komunitas untuk mencapai tujuan mereka. Ini melibatkan peningkatan infrastruktur, kebijakan, regulasi, serta jaringan sosial dan institusional yang memengaruhi cara individu dan organisasi beroperasi dalam masyarakat.

a. Kolaborasi Antar Lembaga: Memperkuat kemitraan antara berbagai instansi pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam PKH.

b. Pengembangan Kebijakan: Mempengaruhi kebijakan yang mendukung pelaksanaan program secara lebih efektif.

Prinsip dan Pendekatan yang Ditekankan:

a. Partisipasi: Melibatkan pendamping dalam proses pengembangan kapasitas agar mereka memiliki rasa kepemilikan dan komitmen yang tinggi.

b. Fleksibilitas: Menyesuaikan pendekatan pengembangan kapasitas dengan kondisi lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh pendamping PKH.

c. Sustainability: Mengupayakan pengembangan kapasitas yang dapat bertahan dalam jangka panjang, dengan fokus pada hasil yang berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas lingkungan atau sistem sosial berfokus pada menciptakan kondisi eksternal yang mendukung dan memperkuat kemampuan individu dan organisasi untuk berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Ini adalah elemen kunci dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konteks PKH, pengembangan kapasitas pendamping menurut Milen menekankan pada kebutuhan untuk memperkuat kemampuan mereka tidak hanya pada level individu tetapi juga dalam konteks organisasi dan lingkungan yang lebih luas. Ini penting untuk memastikan bahwa program dapat dijalankan dengan lebih efektif dan mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Sama dengan pendapat milen didesa pucangsari juga menggunakan tiga tingkatan pengembangan kapasitas yaitu pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas organisasi, dan pengembangan kapasitas lingkungan. Namun dalam penerapan tingkatan kapasitas belum diimplementasikan sesuai dengan teori milen dikarenakan beberapa factor penghambat untuk menerapkannya maka diperlukan Kerjasama yang baik antara pendamping pkh sekecamatan purwodadi dan juga KPM untuk menciptakan program Bersama.

Hambatan Pengembangan kapasitas pendamping program keluarga harapan (PKH) di Desa Pucangsari

Hambatan dalam pengembangan kapasitas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya adalah situasi di mana terdapat kekurangan atau tidak cukupnya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu program, proyek, atau aktivitas secara optimal. Sumber daya ini dapat berupa anggaran (keuangan), infrastruktur, teknologi, tenaga kerja, waktu, atau bahan-bahan yang mendukung kegiatan.

a. Anggaran yang Terbatas adalah Pendanaan yang tidak mencukupi untuk pelatihan dan pengembangan dapat membatasi kesempatan pendamping untuk meningkatkan keterampilan.



b. Keterbatasan Infrastruktur seperti Kurangnya akses ke teknologi, fasilitas pelatihan, atau peralatan kerja yang memadai.

2. Kualitas dan Konsistensi Pelatihan merujuk pada seberapa baik dan merata pelatihan yang diberikan dalam rangka pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu atau kelompok. Kedua aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi KPM.

- a. Pelatihan yang Tidak Memadai: Program pelatihan mungkin tidak mencakup semua keterampilan yang diperlukan atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
- b. Kurangnya Pelatihan Berkelanjutan: Pendamping mungkin tidak mendapatkan pelatihan lanjutan atau penyegaran untuk terus meningkatkan kompetensinya.

3. Tantangan di Lapangan merujuk pada seberapa baik dan merata pelatihan yang diberikan dalam rangka pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu atau kelompok. Kedua aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi KPM.

a. Kondisi Kerja yang Sulit: Pendamping sering bekerja di daerah terpencil dengan akses terbatas ke fasilitas dasar, yang mempengaruhi kinerja mereka.

b. Kompleksitas Sosial dan Budaya: Perbedaan budaya dan norma sosial di daerah penugasan dapat menghambat efektivitas komunikasi dan implementasi program.

4. Dukungan dan Supervisi yang Terbatas merujuk pada kurangnya bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program atau proyek. Dalam konteks pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dukungan dan supervisi yang terbatas dapat menghambat efektivitas pendamping dalam melaksanakan tugas mereka dan mencapai tujuan program.

- a. Kurangnya Supervisi: Pendamping mungkin tidak mendapatkan bimbingan dan supervisi yang memadai dari atasan mereka.
- b. Isolasi: Pendamping yang bekerja di daerah terpencil mungkin merasa terisolasi tanpa dukungan yang cukup dari jaringan profesional.
- c. Beban Administratif yang Tinggi erujuk pada volume pekerjaan administratif yang harus dikelola oleh individu atau tim dalam menjalankan tugas mereka. Beban administratif ini sering kali mencakup berbagai aktivitas seperti pelaporan, pengumpulan data, dokumentasi, dan koordinasi yang dapat menghambat fokus pada tugas inti dan efektivitas keseluruhan. Dalam konteks pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), beban administratif yang tinggi dapat menciptakan sejumlah tantangan:
 - a. Tugas Administratif yang Berlebihan: Tugas pelaporan dan administrasi yang banyak dapat mengurangi waktu yang tersedia bagi pendamping untuk berinteraksi langsung dengan penerima manfaat.
 - b. Pemanfaatan Teknologi yang Terbatas merujuk pada situasi di mana individu atau organisasi tidak dapat memanfaatkan teknologi secara optimal atau memiliki akses terbatas ke teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan. Dalam konteks pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemanfaatan teknologi yang terbatas dapat menimbulkan berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program. Berikut adalah beberapa aspek terkait pemanfaatan teknologi yang terbatas.
 - c. Kurangnya Akses Teknologi: Pendamping mungkin tidak memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan mereka, seperti perangkat lunak untuk pelaporan.

d. Keterampilan Teknologi yang Rendah: Pendamping mungkin tidak dilatih untuk memanfaatkan teknologi secara efektif.

1. Perubahan kebijakan yang Tidak Konsisten

Kebijakan yang Berubah-Ubah: Pendamping harus sering menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang tidak selalu disosialisasikan dengan baik.

Kurangnya Penjelasan: Perubahan kebijakan yang tidak dijelaskan dengan baik dapat membingungkan pendamping dan menghambat pelaksanaan program.

8. Motivasi dan Kesejahteraan Pendamping

a. Menurunnya Motivasi: Beban kerja yang berat dan kurangnya dukungan dapat menurunkan semangat dan motivasi pendamping.

b. Kesejahteraan Fisik dan Mental: Pendamping yang mengalami stres atau mungkin kurang efektif dalam menjalankan tugas mereka.

Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan kualitas dan konsistensi pelatihan, serta dukungan berkelanjutan untuk pendamping PKH

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tentang pengembangan kapasitas pendamping Desa Pucangsari, dengan fokus pada kesanggupan dan kecakapan pendamping PKH, adalah sebagai berikut :

1. Kesanggupan: Pendamping di Desa Pucangsari menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas, namun kesanggupan mereka masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas yang lebih komprehensif. Mereka membutuhkan dukungan yang lebih besar dalam hal sumber daya dan pelatihan berkelanjutan agar dapat menjalankan peran mereka dengan lebih efektif.

2. Kecakapan: Dari segi kecakapan, pendamping PKH di Desa Pucangsari memiliki dasar yang kuat, namun masih terdapat kesenjangan dalam hal keterampilan teknis dan interpersonal. Pelatihan yang lebih spesifik dan terfokus, terutama dalam hal manajemen konflik, komunikasi efektif, dan teknik pemberdayaan masyarakat, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan di lapangan.

Secara keseluruhan, pengembangan kapasitas pendamping PKH di Desa Pucangsari perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat lebih siap dan cakap dalam menjalankan tugas pendampingan, sehingga program PKH dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Faktor penghambat pengembangan kapasitas pendamping program keluarga harapan (PKH) antara lain adalah jadwal pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga antara pendamping dengan KPM, Persepsi negatif dari sebagian masyarakat Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi

DAFTAR PUSTAKA

- Diaz, S. T., & Sursiloadi, P. (2023). Implimentasi Program Kreluarga Harapan (Pkh) Dalam Urpaya Prengrentasan Kremiskinan Di Krecamatan Banjarsari Kota Surrakarta Tahurn 2020-2021. *Jurrnal Administrasi Purblik*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.31506/jap.v14i1.17554>
- Kremrensos RI. (2024). Kreputursan Dirrekturr Jrendrerel Prerlindurngan dan Jaminan Sosial Nomor 8/3/bs.00.01/1/2024 trentang Preturnjurk Treknis Prelaksanaan Program Milres, M., A.M. Hurbberman, And J. Saldana. 2014. *Quralitative Data Analysis A Mrethods Sourcrebook*. rEdisi Kre-3. Amrerica: Sagre Purblications.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial

Volume 4 No11 Tahun 2024

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

